

Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah

Astari, Sobrotul Imtikhanah, Muh. Fithrayudi T.
*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*
astar.aril@gmail.com

Abstrak

Indonesia, dengan 38 provinsinya, memerlukan pengawasan dan regulasi yang signifikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi menawarkan solusi untuk mengelola banyaknya pemerintahan daerah, dengan tujuan memberdayakan daerah dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Meskipun desentralisasi telah berjalan hampir satu dekade, daerah-daerah tetap bergantung secara finansial pada pemerintah pusat. Studi ini meneliti flypaper effect sebagai indikator keberhasilan desentralisasi, dengan fokus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan dari tahun 2018-2023. Studi ini mengevaluasi (1) pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, (2) mana yang memiliki pengaruh lebih besar, (3) keberadaan flypaper effect, dan (4) apakah efek tersebut bervariasi dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah. Studi ini bersifat deskriptif dan memakai analisis kuantitatif, sehingga data disajikan dalam bentuk angka atau dapat diukur. Temuan menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut menentukan belanja daerah dan flypaper effect terjadi di Jawa Tengah dari tahun 2018-2023, bahkan di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.

Kata Kunci : *Flypaper Effect, Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah*

Abstract

Indonesia, with its 38 provinces, requires significant oversight and regulation by the central government. Decentralization offers a solution for managing the numerous regional governments, with the aim of empowering regions and ensuring equitable development across the country. Although decentralization has been in place for nearly a decade, regions remain financially dependent on the central government. This study examines the flypaper effect as an indicator of decentralization success, focusing on districts and cities in Central Java Province, particularly the former Pekalongan Residency area from 2018 to 2023. The study evaluates (1) the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Local Revenue (PAD) on Regional Expenditure, (2) which has a greater influence, (3) the presence of the flypaper effect, and (4) whether the effect varies with the level of Local Revenue. This study is descriptive and uses quantitative analysis, so the data is presented in numerical form or can be measured. The findings show that both sources of revenue determine regional spending, and the flypaper effect occurred in Central Java from 2018 to 2023, even in regions with high Local Revenue.

Keywords: *Flypaper Effect, Decentralization, Regionally Original Income, General Allocation Fund, Regional Expenditure*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan banyak provinsi di dalamnya. Karena luasnya wilayah dan banyaknya provinsi, pemerintah pusat menghadapi beban dalam mengelola negara ini. Selain itu, banyak masalah terkait pemerintahan negara yang muncul dari tuntutan berbagai daerah terhadap kontribusi mereka kepada pemerintah pusat. Situasi ini mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, dengan melibatkan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola perkara mereka sendiri. Pelimpahan kekuasaan ini disertai dengan tanggung jawab terkait pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengelola daerah mereka secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat (Suparto, 2017).

Paradigma sistem pemerintahan berubah dengan adanya otonomi daerah. Bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi. Sistem desentralisasi memungkinkan daerah membentuk wilayah otonom yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Target utama memberi otonomi kepada daerah merupakan usaha menaikkan kemampuan serta keefektifan pemerintah daerah, terutama pada hal pembangunan dan penyediaan layanan publik, serta memperkuat persatuan politik dan nasional (Faisal; Nasution, 2016).

Desentralisasi tidak hanya terbatas pada negara kesatuan atau federal; di negara kesatuan, ada satu kekuasaan yang dibagi kepada pemerintah daerah, yang bisa dipahami sebagai hubungan *top-down* di mana satu kekuasaan tunggal dibagi di antara daerah-daerah bawahannya. Sebaliknya, negara federal terdiri dari wilayah-wilayah berdaulat yang bersatu. Desentralisasi sendiri mencakup berbagai macam dan aspek, terutama yang berhubungan dengan sistem fiskal, politik, administrasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi (Yustika & Erani, 2008)

Dalam buku mereka, Hartmann & Crawford (2015) menjelaskan bahwa "*Decentralization entails the transfer of power, responsibilities, and finance from central government to sub-national levels of government at provincial and or local levels*". Desentralisasi diartikan sebagai pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang mencakup tiga aspek: kekuasaan, tanggung jawab, dan dana. Taufiq (2010) menjelaskan jika desentralisasi pada dasarnya bisa terbagi dalam tiga kelompok: desentralisasi politik, desentralisasi administratif, serta desentralisasi fiskal, yang semuanya saling terkait dan sebaiknya diimplementasikan bersama-sama untuk mencapai berbagai tujuan otonomi daerah, seperti kenaikan pelayanan publik.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, momen ini menandai pergeseran dalam tata kelola negara, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang diterapkan pemerintah juga bermakna pada pendeklasian fiskal, yang mengacu pada proses alokasi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat, ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintah daerah untuk menyokong pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Proses ini disesuaikan dengan sejauh mana hak yang diberikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sehingga memberikan kesempatan bagi daerah untuk memaksimalkan potensi mereka. Dengan otonomi daerah, diinginkan pemerintah daerah menjadi lebih

independen kemudian tidak mengandalkan pada pemerintah pusat pada hal pengelolaan keuangan dan pendanaan pembangunan. Tujuan alokasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni untuk membantu pembiayaan kebutuhan daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan yang signifikan ini, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Redistribusi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberlakukan. Redistribusi anggaran ini dicapai lewat dana perimbangan yang bermula dari pendapatan anggaran negara yang disalurkan ke setiap daerah untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi secara praktis. Dana perimbangan mencakup dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana ini berguna sebagai sumber permodalan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan lokal. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai tujuan sendiri dalam praktik pemerintahan. Dana Bagi Hasil bertugas dalam menyeimbangkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pendapatan pajak yang dibagikan. DAU berfungsi sebagai sarana pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. DAK berfungsi untuk dana yang mendukung inisiatif kebijakan darurat (Saragih & Panglima, 2003)

Mengacu regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) bermula dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibagikan guna menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah. DAU bertujuan guna meratakan kinerja fiskal daerah dengan menjalankan perhitungan yang menghitung kebutuhan belanja dan anggaran, dan kapasitas daerah. Selain berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pemerataan pendapatan di seluruh pemerintah daerah, alokasi DAU seharusnya idealnya digunakan sebagai alat untuk mengungkit potensi dan merangsang sumber daya ekonomi lokal guna meningkatkan PAD suatu daerah. Namun, mencapai tujuan ini masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah menghadapi hambatan dalam mengoptimalkan potensi PAD, seperti masalah kepemilikan dan keterbatasan pengelolaan sumber daya alam yang langka, yang akhirnya menyebabkan ketergantungan pada pendanaan atau alokasi dari pemerintah pusat. Seiring waktu, penyimpangan dari tujuan awal transfer daerah semakin sering terjadi dalam upaya mengurangi kesenjangan anggaran antar daerah. Tampak dari bagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana proporsi DAU tetap cukup besar dan relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah PAD atau pendapatan sah daerah lainnya.

Di sisi lain, belanja daerah selalu menjadi sorotan publik. Sebagai pihak yang berkontribusi terhadap dana publik melalui pembayaran pajak daerah, masyarakat mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa dana tersebut dikelola secara optimal, efisien, dan sejalan dengan kepentingan umum. Menurut F Simanjuntak dkk. (2013), belanja daerah mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugas yang disalurkan oleh pemerintah dan untuk menangani aspek tertentu yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah maupun pusat, atau keduanya.

Oleh karena itu, pembangunan daerah harus komprehensif dan terkoordinasi agar setiap wilayah dapat berkembang sesuai dengan prioritas dan potensinya. Pemerintah daerah berlomba-lomba dalam upaya pembangunan dengan merancang strategi untuk

menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyalurkan dana tersebut ke sektor ekonomi. Karena PAD dimiliki langsung oleh pemerintah daerah dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dana tersebut untuk tujuan pembangunan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan proyek pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa PAD ialah perolehan yang didapat suatu daerah lewat sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengaturan kekayaan daerah yang dibagi, dan perolehan sah lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku. Merujuk definisi lainnya, pendapatan yang didapat dari sektor pajak, retribusi, badan usaha milik daerah, pengaturan kekayaan yang dibagi, dan sumber sah lainnya dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2018).

Ketika merealisasikan otonomi daerah, PAD menjadi elemen yang dipakai untuk mengukur tingkat independen keuangan suatu daerah. PAD yang lebih tinggi menandakan bahwa daerah tersebut lebih mandiri secara finansial, yang berarti tidak perlu mengandalkan pada transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. Kenaikan PAD menandakan seberapa baik daerah tersebut mengatur sumber pendapatan lokal. Namun, jika PAD digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menambah beban bagi masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus disertai dengan upaya dari pemerintah daerah untuk menaikkan kualitas pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber perolehan yang mendukung pembangunan di tingkat daerah, seperti pembangunan infrastruktur, PAD juga menunjukkan kemampuan daerah dalam memakai sumber daya yang ada. Karena PAD memainkan peran penting dalam pembiayaan daerah, keahlian ekonomi suatu daerah ditentukan oleh seberapa besar hubungan antara peran PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar peran PAD, semakin kecil kebiasaan daerah terhadap bantuan pusat.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ialah bagian dari Transfer Keuangan Daerah yang memiliki tujuan guna mengecilkan disparitas keahlian keuangan dan pelayanan publik antar daerah. Oleh karena itu, DAU ialah dana tahunan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah di Indonesia. Dana ini digunakan untuk membantu pembangunan di setiap daerah, terutama di daerah yang terdesentralisasi, sesuai dengan kebutuhan mereka.

DAU, yang berfungsi sebagai pilar utama pembiayaan APBD, sebagian besar dipakai untuk pengeluaran pegawai, yang menyebabkan pengurangan anggaran yang signifikan untuk proyek pembangunan. DAU diklasifikasikan sebagai transfer tidak bersyarat atau *block grant*, yaitu bentuk transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan rancangan pengeluaran tertentu. Fungsi utama dari bantuan ini ialah guna menyiapkan dana yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Sebagai transfer tidak bersyarat atau *block grant*, pemakaian DAU ditentukan oleh daerah penerima. Namun, Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Pasal 15 menyatakan bahwa pemakaian DAU dimaksudkan guna meratakan kapasitas keuangan daerah guna memastikan pengadaan layanan dasar bagi masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan jika belanja daerah mengacu pada semua tugas yang disahkan oleh

pemerintah daerah sebagai pengecilan nilai aset bersih selama tahun anggaran tertentu, tetap menjadi tanggung jawab daerah selama tahun anggaran tersebut dan tidak akan diganti oleh daerah. Belanja daerah mencakup semua tugas pemerintah daerah yang disahkan sebagai penurunan nilai aset bersih selama tahun anggaran tersebut. Belanja daerah dimaksudkan untuk menanggung tugas pemerintahan yang dipegang oleh daerah. Ada tiga metode yang digunakan untuk menyusun belanja daerah: kerangka anggaran jangka menengah, penganggaran yang menyeluruh, dan penganggaran berbasis hasil menjadi pedoman. Belanja daerah harus disesuaikan dengan standar harga serta analisis belanja yang ada.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki dampak signifikan pada belanja daerah dalam perencanaan APBD yang diterapkan sejak tahun anggaran 2021.

Berdasarkan data dari djpb.kemenkeu.go.id, terjadi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun anggaran 2017. Target pendapatan meningkat sebesar 3,82%, dari Rp93,732 triliun menjadi Rp97,313 triliun. Sementara itu, anggaran belanja dan transfer juga meningkat sebesar 5,06%, dari Rp97,981 triliun menjadi Rp102,934 triliun. Defisit anggaran juga meningkat, dari Rp4,249 triliun pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 menjadi Rp5,621 triliun. Target pendapatan agregat untuk Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 adalah Rp97,313 triliun. Pada kuartal pertama tahun anggaran 2018, realisasi pendapatan hanya mencapai 22,97%, sedikit di bawah angka sebelumnya sebesar 23,01%. Surplus juga menurun menjadi Rp11,296 triliun, menunjukkan perlunya percepatan realisasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, bisa ditentukan jika perolehan Transfer tetap menjadi kontributor terbesar sebesar 69%, diikuti oleh PAD sebesar 26%, dan Pendapatan Sah Lainnya sebesar 5%.

Pada tahun 2020, realisasi PAD di Jawa Tengah mencapai Rp5,097 triliun, atau 17% dari target. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Rp4,278 triliun atau 16% dari target. Meskipun terjadi peningkatan nominal, persentase realisasi terhadap target lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun 2019. Meskipun demikian, elemen PAD Sah Lainnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase realisasi, dari 9% dari target sebelumnya (Rp 749 miliar) menjadi 17% dari target pada kuartal pertama tahun 2020 (Rp1,481 triliun). Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam mengelola pendapatan hingga kuartal pertama dapat dianggap baik. Namun, wabah yang menjadi penghalang dalam pengumpulan pendapatan pada akhir kuartal pertama menunjukkan perlunya antisipasi dan persiapan langkah-langkah berikutnya melalui kebijakan yang komprehensif sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi secara keseluruhan.

Sementara itu, untuk dana transfer, realisasi pada kuartal pertama tahun 2020 mencapai Rp13,273 triliun, atau setara dengan 19% dari target, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,973 triliun atau 20% dari target. Pendapatan Transfer menjadi kontributor terbesar, mencapai 71,9% dari Total Pendapatan Jawa Tengah. Mayoritas realisasi berasal dari jenis Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, yang mencapai Rp 12,249 triliun, yang menyumbang 92% dari Total Pendapatan Transfer.

Penelitian ini berfokus pada fenomena *flypaper effect*, yang menandakan jika pemerintah daerah condong lebih memilih memakai dana perimbangan seperti DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk meningkatkan belanja, ketimbang memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Turnbull (1992) dalam Pratiwi & Paramita (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan fenomena *flypaper effect*, dana transfer akan mendorong belanja pemerintah daerah lebih dari jumlah pemasukan transfer tersebut.

Flypaper effect terlaksana karena keterikatan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Putra & Dwirandra, 2015). *Flypaper effect* ini merupakan pada terhadap fluktuasi pengaplikasian dana perimbangan melalui pemerintah pusat(Pratiwi & Paramita, 2016). *Flypaper effect* bisa diukur dengan mengkaji koefisien dari dana transfer dengan Perolehan Asli Daerah, sebagaimana hasil uji Maimunah (2006) dalam Melda & Syofyan (2020). Istilah *flypaper effect* muncul sebagai perbedaan dari teori bantuan pemerintah bersyarat, yang menandakan jika peningkatan transfer dari pemerintah pusat dapat menaikkan belanja untuk konsumsi barang publik, namun tidak menggantikan fungsi pajak daerah (Kurnia, 2013).

Flypaper Effect merujuk pada fenomena di mana hibah pemerintah atau dana transfer menyebabkan pemerintah daerah meningkatkan belanja mereka lebih dari pendapatan mereka sendiri (Serbes & Çetinkaya, 2022). Karakteristik *flypaper effect* umumnya dapat diidentifikasi sebagai kondisi di mana pembiayaan konsumsi atau belanja modal pemerintah daerah cenderung lebih tinggi ketika menggunakan dana transfer dibandingkan dengan memakai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian mereka, Serbes & Çetinkaya (2022) menjelaskan bahwa hubungan ini telah diuji dalam berbagai studi di Turki, yang menyimpulkan bahwa dampak peningkatan belanja dari dana transfer yang berasal dari pendapatan pajak anggaran umum Turki lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan di Turki sendiri.

Selain di Turki, *flypaper effect* juga telah dipelajari di beberapa negara lain, seperti Polandia dan Indonesia, di mana dampak transfer antarpemerintah terhadap belanja infrastruktur telah dianalisis. Studi ini menawarkan wawasan yang lebih luas mengenai ikatan antara subsidi pemerintah dan belanja pemerintah daerah, serta mengungkapkan kompleksitas desentralisasi fiskal dan hubungan fiskal antar pemerintah. Maimunah (2006) dalam Adiputra (2014) menandakan jika kejadian *flypaper effect* muncul ketika pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja mereka memakai dana transfer (hibah) yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU), dibanding ketergantungan terhadap kekuatan keuangan mereka sendiri, yang diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemaparan fenomena serta argumentasi, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apakah DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah?; (2) Bagaimana pengaruh PAD dan DAU pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?; (3) Apakah *flypaper effect* terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada masa 2018-2023?; (4) Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau rendah.

Studi perihal kejadian *flypaper effect* telah banyak ditinjau baik secara lokal maupun global. Misalnya, studi yang dikerjakan oleh F Simanjuntak dkk. (2013) menemukan bahwa baik DAU maupun PAD secara bersamaan mempengaruhi belanja daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Jumlah DAU dan PAD yang lebih tinggi

mempunyai dampak lebih besar pada belanja daerah di kabupaten/kota tersebut, tetapi DAU yang lebih rendah tidak mempengaruhi keseluruhan belanja daerah. Hasil studi menandakan jika *flypaper effect* tidak mempengaruhi DAU dan PAD untuk belanja daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan, baik pada tingkat yang tinggi maupun rendah.

Ginting (2019) melakukan penelitian berjudul "Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara." Pada studi ini, Belanja daerah adalah variabel dependen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum adalah variabel independen. Fokus studi ini ialah kabupaten/kota di Sumatera Utara, di mana ukuran contoh sama dengan populasi, melalui analisis regresi data panel. Hasil studi menandakan *flypaper effect* pada ketiga model yang dipakai: belanja publik total, belanja di pendidikan, dan belanja di kesehatan. Ini berarti bahwa jika ada lebih banyak dana alokasi umum, belanja publik total, belanja di pendidikan, dan belanja di kesehatan akan meningkat..

Ikhwani dkk. (2019) menjalankan penelitian berjudul "*Flypaper Effect* pada Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh." Dalam studi ini, variabel dependen ialah belanja daerah, namun variabel independen mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini fokus pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2018, memakai analisis regresi linear berganda. Ukuran sampel sama dengan ukuran populasi untuk penelitian ini. Hasilnya menjabarkan bahwa *flypaper effect* muncul di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Melda & Syofyan (2020) melakukan studi berjudul "Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Perolehan Asli Daerah pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat." Variabel independen dalam studi ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan belanja daerah merupakan variabel dependen. Studi ini mencakup 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga 2018, dengan ukuran sampel yang mencakup seluruh populasi studi. Analisis menggunakan regresi berganda. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing memberikan efek positif yang penting pada belanja daerah. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil tidak menunjukkan dampak signifikan pada belanja daerah di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Studi ini juga menunjukkan bahwa koefisien dana transfer lebih besar daripada faktor Pendapatan Asli Daerah, yang menandakan munculnya *flypaper effect* di kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Wati dkk. (2022) melakukan analisis berjudul "*The Flypaper Effect Phenomenon of Intergovernmental Transfers During the Covid-19: Evidence from Indonesia*". Variabel dependen dalam studi ini ialah belanja daerah, namun variabel independennya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), pembiayaan pemerintah daerah, dan Covid-19 sebagai variabel independen dan moderasi. Studi ini menggunakan *Moderating Regression Analysis*. Data yang dipakai ialah data aktual dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indonesia tahun 2019 dan 2020, melibatkan 531 pemerintah daerah, termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. Sampel ditentukan dengan mengaplikasikan *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Menurut penelitian ini, terdapat fenomena *flypaper effect* yang mendorong pemerintah

daerah untuk menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja mereka. Fenomena *flypaper effect* ini menyebabkan peningkatan belanja pemerintah daerah pada DAU dan PAD selama pandemi Covid-19.

Kustianingsih dkk. (2022) melakukan penelitian berjudul "*Flypaper Effect on Regional Original Revenue and General Allocation Funds on Regional Expenditure in East Java Province*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ialah variabel independen pada studi ini, dengan belanja daerah sebagai variabel dependen. Studi ini menggunakan kajian regresi linier berganda. Studi ini berfokus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai data realisasi APBD (PAD, DAU, dan belanja daerah) dari tahun 2019 hingga 2020. Sampel ini mencakup dari 28 kabupaten dan 9 kota dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki data PAD, DAU, dan belanja daerah dari tahun 2019 hingga 2020. Hasilnya menandakan jika belanja daerah di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh perolehan daerah dan dana pembagian umum. Menurut analisis tambahan, *flypaper effect* terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Studi lain juga dikerjakan oleh Isik et al. (2023), *flypaper effect* terjadi baik di Nigeria maupun Afrika Selatan, dalam periode singkat dan panjang. Studi tersebut menemukan jika *flypaper effect* secara signifikan lebih besar pada pemerintah provinsi di Afrika Selatan dibandingkan dengan pemerintah negara bagian di Nigeria.

Berdasarkan studi sebelumnya yang telah dijabarkan di atas, dengan demikian kebaruan studi pertama adalah variabel yang dipakai dalam studi ini hanya berfokus pada DAU dan PAD. Kebaruan kedua adalah studi ini memakai masa waktu yang lebih lama, yaitu pada masa 2018 – 2023 sehingga penelitian akan lebih akurat dan relevan.

Pada studi ini, teori yang diterapkan adalah *Agency Theory*. Menurut *Agency Theory*, PAD mencerminkan interaksi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai pemilik. Masyarakat, sebagai pemilik, telah menyediakan sumber daya untuk pemerintah daerah, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya, untuk menaikkan PAD. Sebagai agen, pemerintah daerah diharapkan memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan manfaat. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) menurut *Agency Theory* menggambarkan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa menaikkan distribusi belanja daerah untuk melengkapi semua kebutuhan layanan publik dan pembangunan daerah dalam konteks desentralisasi yang merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga peneliti menggunakan analisis kuantitatif, di mana data diwakili dalam satuan numerik atau dapat diukur. Statistik deskriptif pada konteks ini menjabarkan variabel yang dipakai pada studi, termasuk variabel dependen dan independen. Tujuan penyajian statistik deskriptif adalah untuk menyampaikan pemahaman yang lebih baik mengenai data terkait variabel studi. Variabel yang diterapkan dalam studi ini ialah PAD, DAU, dan Belanja Daerah. Data yang dipakai pada studi ini ialah data sekunder yang didapat dari situs web Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Data yang dianalisis berasal dari pemerintah daerah (Kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018 hingga 2023. Studi ini melibatkan keseluruhan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup 29 kabupaten dan 6 kota, sebagai populasi. Wilayah eks-Karesidenan Pekalongan digunakan sebagai sampel penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipakai guna mengira penyesuaian nilai variabel dependen menurut penyesuaian nilai variabel independen. Analisis ini juga menetapkan apakah ada interaksi positif atau negatif antara variabel terikat serta variabel bebas. Tabel di bawah menyajikan hasil model regresi yang diolah memanfaatkan program IBM SPSS Statistik 26.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-128.992.523.364,962	40.223.499.666,842		-3.207	.002
PAD	.984	.031	.475	31.804	.000
DAU	2.104	.044	.709	47.425	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Mengacu *output* olah data pada tabel diatas didapat persamaan regresi berikut
$$Y = -128.992.523.364,962 + 0,984 X_1 + 2,104 X_2$$

Dari persamaan tersebut, maka bisa ditetapkan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebanyak -128.992.523.364,962 menandakan jika ketika variabel bebas, yaitu PAD (X₁) dan DAU (X₂), bernilai 0, dengan demikian Belanja Modal (Y) akan bernilai negatif sebesar -128.992.523.364,962.
- Koefisien regresi untuk Perolehan Asli Daerah (X₁) adalah 0,984. Dengan demikian, setiap penambahan 1 rupiah ke PAD (X₁) akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal sebanyak Rp 0,984, dengan anggapan variabel lain tetap.
- Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Umum (X₂) adalah 2,104. Dengan demikian, setiap penambahan 1 rupiah ke DAU (X₂) akan menambah Belanja Modal sebanyak Rp 2,104, dengan anggapan variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian koefisien determinasi ialah guna mengukur sejauh mana model dapat membahas variasi pada variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) menandakan sejauh mana variasi dalam variabel dependen bisa diuraikan oleh variabel independen pada model tersebut.

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	

1	.979 ^a	.959	.959	145.125.443.260,745
---	-------------------	------	------	---------------------

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Mengacu pada tabel, Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,959 menunjukkan jika 95,9% variasi Belanja Daerah mampu dijabarkan oleh variabel bebas (PAD dan DAU). Sebaliknya, 4,1% variasi Belanja Daerah disebabkan oleh aspek lain yang tidak termasuk pada model studi ini.

Signifikansi Simultan

Hasil signifikansi simultan (uji F) menandakan apakah keseluruhan variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat dalam model.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	102.426.932.025.185,40	2	51.213.466.012.592,70	2.431,63	.000 ^b
Residual	4.359.708.609.023,12	207	21.061.394.246,49		
Total	106.786.640.634.208,53	209			

Berdasarkan tabel, angka F_{hitung} senilai 2,431,63 yang mana melampaui dari F_{tabel} yaitu 3,04 ($2,431,63 > 3,04$). Ini menandakan jika variabel bebas, yakni Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), berdampak positif secara simultan pada variabel dependen, yaitu Belanja Modal (Y).

Uji Statistik

Uji t dijalankan untuk mengevaluasi dampak variabel independen pada variabel dependen secara individu. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < 0,05$. Namun, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig. > 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-128.992.523.364,962	40.223.499.666,842		-3,207	.002
PAD	.984	.031	.475	31,804	.000
DAU	2.104	.044	.709	47,425	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Menurut tabel, hasil yang didapatkan ialah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (X1): Nilai t_{hitung} sebanyak 31,804 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,971. Nilai signifikansi tercatat 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan jika Pendapatan Asli Daerah (X1) mempunyai dampak positif dan penting pada Belanja Modal (Y). Sehingga, dugaan jika PAD berdampak pada Belanja Daerah dapat diterima..
- Dana Alokasi Umum (X2): Nilai t_{hitung} sebesar 47,425, yang melampaui t_{tabel} sebesar 1,971. Nilai signifikansi adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandai jika Dana Alokasi Umum (X2) mempunyai dampak positif dan penting pada Belanja Modal (Y). Oleh sebab itu, hipotesis bahwa DAU mempengaruhi Belanja Daerah diterima..

KESIMPULAN

Studi ini dimaksudkan guna menyelidiki dan menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Daerah, serta menguji fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan populasi yang mencakup 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada kurun waktu 2018 hingga 2023. Sampel penelitian mencakup kota dan kabupaten di wilayah bekas Kabupaten Pekalongan.

Kesimpulan dari analisis adalah sebagai berikut:

- i. DAU dan PAD menyebabkan belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Koefisien regresi untuk keduanya signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak positif terhadap belanja daerah.
- ii. PAD dan DAU memberikan dampak signifikan dengan arah positif pada Belanja Daerah, dengan DAU memberikan pengaruh yang paling besar. Hal ini didukung dengan nilai indikator regresi PAD positif sebesar 0,984 dengan nilai t_{hitung} sebanyak 31,804, yang lebih besar dari t_{tabel} sebanyak 1,971 ($31,804 > 1,971$). Nilai signifikansi 0,00 juga lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), menunjukkan bahwa PAD berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Koefisien regresi DAU positif sebanyak 2,104 dengan nilai t_{hitung} sebanyak 47,425, yang lebih besar dari t_{tabel} sebanyak 1,971 ($47,425 > 1,971$). Nilai signifikansi 0,000 juga lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
- iii. Pengujian menyatakan jika kejadian *flypaper effect* muncul pada semua kota dan kabupaten di Jawa Tengah kecuali Kota Semarang. Ini mengindikasikan bahwa respons pemerintah daerah terhadap DAU lebih besar daripada PAD pada membiayai Belanja Daerah, yang menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana pemerintah pusat. Ini diperkuat oleh koefisien regresi untuk DAU adalah 2,104 dan untuk PAD adalah 0,984, keduanya signifikan secara statistik. Ini menunjukkan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara 2018 - 2023, dengan koefisien DAU yang lebih besar dari PAD, sesuai dengan kriteria *flypaper effect*.
- iv. Kota dan kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD rendah pada periode 2018-2023 mengalami fenomena *flypaper effect*. Hal ini dibuktikan dengan pengujian *Flypaper Effect* di pemda yang mempunyai PAD rendah maupun tinggi menunjukkan jika angka *Standardized Coefficients* PAD adalah 0,475 dan DAU adalah 0,709. Karena *Standardized Coefficients* DAU lebih tinggi daripada PAD, ini mengindikasikan bahwa *Flypaper Effect* terjadi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, 3(2).
- F Simanjuntak, L. L., Subeki, A., Sasti Ferina, I., & Yusrianty, H. (2013). Analysis of Flypaper Effect In General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure Of Districts and Cities In South Sumatera.
- Faisal; Nasution, A. huda. (2016). Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, 206–215.
- Ginting, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian*, 24(2), 113–130. <https://doi.org/10.1016/S0305>
- Hartmann, C., & Crawford, G. (2015). Decentralization in Africa: A Pathway out of Poverty and Conflict? <https://www.researchgate.net/publication/281593566>
- Ikhwani, N., Naz'aina, & Ratna. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 04(02), 111–123.
- Kurnia, E. D. (2013). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur).
- Kustianingsih, N., Ari Wardhaningrum, O., Studi, P. S., Jember, U., & Kalimantan No, J. (2022). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 8(1), 58–70. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru (XIX). Andi Offset.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/24>
- Pratiwi, D. R., & Paramita, rastri. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 208–234.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Saragih, & Panglima, J. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. *Ghalia Indonesia*.
- Serbes, H., & Çetinkaya, Ö. (2022). Sinek Kâğıdı Etkisine Farklı Bir Yaklaşım: Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Borçlanmaları Üzerinden Bir Analiz. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 20(45), 724–758. <https://doi.org/10.35408/comuybd.1056406>
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/841>
- Taufiq, A. B. (2010). Analisis Belanja Publik Dan Penerapan Standard Costing Pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (Dau) Suatu Kajian Alternatif Pendekatan Transfer Fiskal. *Universitas Indonesia*.

- Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. H. (2022). The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics*, 40(2), 353–373. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353>
- Yustika, & Erani, A. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia : kajian teoritis dan realitas empiris (01 ed.). Bayumedia.